



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 410 TAHUN 2022**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANJARMASIN
TAHUN 2022**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk melengkapi dokumen pendukung Surat Permohonan Persetujuan Subtansi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin, maka perlu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 - b. melaksanakan konsultasi publik;
 - c. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme:
 1. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 2. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana dan/atau program; dan
 3. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - d. melaksanakan pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - e. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - f. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juni 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 410 TAHUN 2022
TENTANG
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 1	Memberikan arahan pada Pokja KLHS RDTR	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 2		
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggungjawab	Bertanggung Jawab secara teknis terhadap tugas Pokja KLHS RDTR	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinasikan anggota dalam pelaksanaan dan penyusunan KLHS RDTR	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu Ketua untuk mengkoordinasikan anggota dalam pelaksanaan dan penyusunan KLHS RDTR	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Sekretaris	Membantu Ketua untuk mengkoordinasikan anggota dalam pelaksanaan dan penyusunan KLHS RDTR	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai arahan Ketua Pokja KLHS RDTR	
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota		
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota		
12.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota		
13.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota		
14.	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
15.	Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		
16.	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		
17.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		
18.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		
19.	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		
20.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		
21.	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		
22.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	TUGAS DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
23.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota		
24.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota		
25.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota		
26.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota		
27.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota		
28.	Baharuddin, S.Kel, M.Si.	Anggota		
29.	Ermawan Reskhi Wibowo, ST	Anggota		Tenaga Ahli bersertifikat KLHS

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA